



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Senin, 14 Juli 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Awasi Pembuang Sampah Liar, DLHK Tambah CCTV di 10 Titik

SIDOARJO - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah liar. Salah satu langkah konkretnya, dengan memperluas cakupan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan lainnya.

Ketua Satgas Ronda Sampah **OOOK** Sidoarjo Suyanto Asmoro mengatakan, sebenarnya sudah ada lima CCTV yang dipasang pihaknya sejak akhir tahun 2024 kemarin. Lokasinya ada di Desa Ngaban, Lingkar Timur Rangkah Kidul, Lingkar Timur Kebonsari, exit Tol Tanggulangin, dan Jalan KH Ali Mas'ud.

"Kami akan tambah 10 titik lagi tahun ini, fokusnya di lokasi yang minim pengawasan dan banyak pelanggaran," ungkapnya. Penambahan CCTV itu diklaim sangat membantu kinerja tim Satgas Ronda Sampah yang selama ini aktif menyisir titik-titik rawan pembuangan liar, terutama pada malam hingga dini hari.

Suyanto menyebutkan, timnya kerap menemukan pelanggaran di jam-jam sepi. "Dengan kamera, kita bisa tindak tanpa harus selalu *stand by* di lapangan," tambahnya. Tak hanya menindak, DLHK juga aktif mengedukasi masyarakat soal pentingnya membuang sampah pada tempatnya. (eza/uzi)



PELAYANAN MAKSIMAL: Proses perizinan di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) dilakukan dengan cepat dan mudah.

Perkim CKTR Permudah Layanan Perizinan, Upaya Digitalisasi dan Pembenahan Sistem Jadi Solusi

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) terus berkomitmen meningkatkan pelayanan publik, khususnya bidang perizinan. Upaya digitalisasi dan pembenahan sistem terus dilakukan agar proses menjadi lebih cepat, transparan dan akuntabel.

Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo, Mochamad Bachruni Aryawan mengatakan, saat ini ada empat layanan perizinan utama yang menjadi kewenangan pihaknya. "Dua di bidang tata ruang pertanahan, yaitu PKKPR dan SKRR, serta dua lainnya di bidang tata bangunan, yaitu PBG dan SLF," ucapnya saat ditemui Radar Sidoarjo.

PKKPR atau Persejuaan Kesesuaian Kegiatan Peman-



faatan Ruang merupakan syarat awal kegiatan usaha maupun bangunan. Sementara SKRR (Surat Keterangan Rencana Kota) menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. Untuk bidang tata bangunan, izin yang dulu dikenal dengan IMB kini berubah menjadi PBG atau Persejuaan Bangunan Gedung. Sedangkan SLF (Surat Laik Fungsi) diperlukan sebelum bangunan digunakan, sebagai jaminan keselamatan dan fungsi teknisnya. Bachruni menjelaskan, sebagian layanan kini telah berbasis digital dan terhubung langsung dengan sistem pusat. PKKPR misalnya, bisa diakses melalui OSS (Online Single Submission), sehingga masyarakat bisa mengurus dari mana saja. Namun, untuk SKRR masih dilakukan secara manual ka-

rena ada kendala teknis pada sistem e-Buddy. "Gambar layout itu belum bisa otomatis diunggah dan sesuai skala, ini yang sedang kami cari solusinya agar bisa dikembangkan ke digital," ujarnya. Proses digitalisasi tetap disertai pendampingan teknis di lapangan. Masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem online tetap bisa mendapatkan bimbingan dari petugas. "Kalau PGB dan SLF menggunakan SIMBG, aplikasi dari pusat, sistemnya upload dokumen lalu kami cek, kalau ada kekurangan langsung kami beri notifikasi untuk diperbaiki," jelasnya. Meski terdengar praktis, Bachruni mengingatkan bahwa proses digital pun tetap membutuhkan ketelitian dari pemohon. Banyak yang tidak membaca notifikasi, padahal hal itulah yang menyebabkan keterlambatan.

Ke Halaman 10



Bupati Sidoarjo Subandi saat sidak pasien TB dan memberikan bantuan bedah rumah di Desa Gelang, Jumat (11/7/25)

Sidak Pasien TB, Bupati Bantu Pengobatan

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo, Subandi, bergerak cepat merespons laporan warga terkait kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Ia melakukan kunjungan langsung ke rumah Chaela (19), warga Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, yang tengah berjuang melawan tiga jenis penyakit sekaligus: peritonitis TB (infeksi TB pada perut), meningitis TB (infeksi selaput otak), dan TB paru. Kunjungan dilakukan Jumat (11/7/25) bersama Danmim 0816/Sidoarjo Letkol Inf. Dedy Wahyu Widodo, Kepala Dinas Kesehatan dr. Lakhsmie Herawati, Camat Tulangan, tim dari Puskesmas Kepadangan, dan perangkat desa setempat. Kondisi Chaela yang sempat memburuk pada Juni 2025 kini mulai membaik, berkat pendamp-

ingan dan visit rutin dari tenaga kesehatan. "Saya minta Dinas Kesehatan terus memantau kondisi dan kesehatan Mbak Chaela ini. Insyaallah dengan pengobatan rutin, TB dapat sembuh," ujar Bupati Subandi saat melihat langsung kondisi pasien. Tidak hanya fokus pada pengobatan, Subandi juga menyoroti kondisi rumah tinggal Chaela yang tidak layak huni. Ia langsung menginstruksikan agar dilakukan renovasi rumah melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). "Kami siapkan anggaran sekitar 20 hingga 25 juta rupiah untuk perbaikan rumahnya. Harapannya, Mbak Chaela dan keluarga bisa tinggal di rumah yang lebih layak, bersih, dan mendukung proses penyembuhan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati, menyampaikan bahwa Chaela termasuk pasien dengan kondisi komorbid cukup berat, sehingga mendapat pendampingan intensif dari puskesmas dan rumah sakit. "Kami fokus pada pemulihan secara bertahap, termasuk penguatan nutrisi. Selain pengobatan, edukasi dan dukungan psikososial kepada keluarga juga sangat penting," jelas dr. Lakhsmie. Ia menegaskan bahwa dalam kasus seperti ini, dukungan keluarga menjadi faktor utama dalam keberhasilan proses penyembuhan. "Kami tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga memastikan keluarga siap memberikan perawatan terbaik di rumah," pungkasnya. • Lo



PERBAIKAN: Lampu Stadion Jenggolo akan direhabilitasi.

Disorapar Anggaran Rp 5,6 Miliar untuk Rehabilitasi Lampu Stadion Jenggolo

BUDURAN-Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo mengucurkan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar untuk memperbaiki lampu Stadion Jenggolo. Rehabilitasi dilakukan guna meningkatkan kualitas sarana olahraga yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus menjadi bagian dari pengembangan sektor pariwisata berbasis olahraga. Kepala Disporapar Sidoarjo, Yudhi Riyanto mengatakan, lampu stadion erlu diperbarui agar layak digunakan untuk pertandingan resmi. Teru-

tama untuk gelaran Liga 3 dan Liga 4 yang selama ini menggunakan Stadion Jenggolo sebagai kandang. "Stadion Jenggolo ini jadi prioritas untuk Liga 1 dan pertandingan lain yang bertaraf internasional," ucapnya, Minggu (13/7). "Jadi, fasilitas pendukungnya juga perlu ditingkatkan agar tetap representatif," imbuhnya. Dia menjelaskan, lampu yang baru nantinya akan disesuaikan dengan regulasi pertandingan malam. Tujuannya agar Stadion Jenggolo memenuhi

syarat teknis secara nasional. "Ini bagian dari pelayanan kami kepada masyarakat Sidoarjo, terutama pecinta olahraga," ujarnya. "Yudhi memastikan, proses rehabilitasi dirancang secara matang, baik dari aspek teknis maupun estetika. Targetnya, stadion tidak hanya nyaman dipakai tetapi juga menarik secara visual."

"Ke depan, Stadion Jenggolo bukan hanya jadi tempat pertandingan, tapi juga bisa menjadi destinasi baru bagi wisatawan lokal maupun luar daerah," pungkasnya. (sai/aga)

Atlet dan Pelatih Cabor di Sidoarjo Menerima Uang Saku

Sidoarjo, Bhirawa
KONI Sidoarjo tetap memperhatikan para atlet dan pelatih Cabang olah raga yang menjadi binaannya. Uang saku yang belum diambil, telah diberikan bagi mereka yang telah melengkapi administrasi yang menjadi persyaratan. Terpantau, Hari Sabtu (12/7) akhir pekan lalu, sejumlah pelatih dan atlet dari beberapa cabang olah raga, datang ke Kantor Sekretariat KONI Sidoarjo di Jalan Pahlawan Nomor 1 Sidoarjo, untuk mengambil uang saku mereka. Ada dari Cabor Akuatik, Tarung derajat, angkat besi, angkat berat dan anggar. Dalam percincangan singkat,

dengan pelatih akuatik renang Sidoarjo, Suyanto, dirinya menyampaikan cabor akuatik Sidoarjo dalam Porprov IX di Malang raya, belum lama ini, berhasil menyumbang sebanyak 53 poin. "Alhamdulillah, hari ini atlet dan pelatih Cabor akuatik yang giliran menerima uang saku," kata Suyanto, yang pernah mendapat penghargaan dari KONI Sidoarjo pada Porprov VIII 2023 lalu, sebagai pelatih terbaik itu. Ketua Umum KONI Sidoarjo, Imam Mukri Affandi, saat di lokasi, sempat mengucapkan terima kasih kepada mereka, karena atas perjuangan dari para atlet dan pelatih Cabor olah raga tersebut selama Porprov Jatim

2025, kontingen Sidoarjo mampu berprestasi pada nomor urut ke -3 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

"Semoga pada Porprov X tahun 2027 di Kota Surabaya, para atlet Sidoarjo lebih berprestasi," ujarnya. [kus.wwn]



Pelatih dan atlet cabang olah raga di Sidoarjo, ketika menerima uang saku di kantor sekretariat KONI Sidoarjo.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



Bupati Sidoarjo Subandi saat sidak pasien TB dan memberikan bantuan bedah rumah di Desa Gelang, Jumat (11/7/25).

LOETFI/DUTA

Sidak Pasien TB, Bupati Bantu Pengobatan

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo, Subandi, bergerak cepat merespons laporan warga terkait kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Ia melakukan kunjungan langsung ke rumah Chaela (19), warga Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, yang tengah berjuang melawan tiga jenis penyakit sekaligus: peritonitis TB (infeksi TB pada perut), meningitis TB (infeksi selaput otak), dan TB paru.

Kunjungan dilakukan Jumat (11/7/25) bersama Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf. Dedyk Wahyu Widodo, Kepala Dinas Kesehatan dr. Lakhsmie Herawati, Camat Tulangan, tim dari Puskesmas Kepadangan, dan perangkat desa setempat.

Kondisi Chaela yang sempat memburuk pada Juni 2025 kini mulai membaik, berkat pendamp-

ingan dan visit rutin dari tenaga kesehatan.

"Saya minta Dinas Kesehatan terus memantau kondisi dan kesehatan Mbak Chaela ini. Inshaallah dengan pengobatan rutin, TB dapat sembuh," ujar Bupati Subandi saat melihat langsung kondisi pasien.

Tidak hanya fokus pada pengobatan, Subandi juga menyoroti kondisi rumah tinggal Chaela yang tidak layak huni. Ia langsung menginstruksikan agar dilakukan renovasi rumah melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Kami siapkan anggaran sekitar 20 hingga 25 juta rupiah untuk perbaikan rumahnya. Harapannya, Mbak Chaela dan keluarga bisa tinggal di rumah yang lebih layak, bersih, dan mendukung proses penyembuhan," ungkapny.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati, menyampaikan bahwa Chaela termasuk pasien dengan kondisi komorbid cukup berat, sehingga mendapat pendampingan intensif dari puskesmas dan rumah sakit.

"Kami fokus pada pemulihan secara bertahap, termasuk penguatan nutrisi. Selain pengobatan, edukasi dan dukungan psikososial kepada keluarga juga sangat penting," jelas dr. Lakhsmie.

Ia menegaskan bahwa dalam kasus seperti ini, dukungan keluarga menjadi faktor utama dalam keberhasilan proses penyembuhan.

"Kami tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga memastikan keluarga siap memberikan perawatan terbaik di rumah," pungkasnya. • Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Atlet dan Pelatih Cabor di Sidoarjo Menerima Uang Saku

Sidoarjo, Bhirawa

KONI Sidoarjo tetap memperhatikan para atlet dan pelatih Cabang olah raga yang menjadi binaannya. Uang saku yang belum diambil, telah diberikan bagi mereka yang telah melengkapi administrasi yang menjadi persyaratan.

Terpantau, Hari Sabtu (12/7) akhir pekan lalu, sejumlah pelatih dan atlet dari beberapa cabang olah raga, datang ke Kantor Sekretariat KONI Sidoarjo di Jalan Pahlawan Nomor 1 Sidoarjo, untuk mengambil uang saku mereka. Ada dari Cabor Akuatik, Tarung derajat, angkat besi, angkat berat dan anggar.

Dalam perbincangan singkat,

dengan pelatih akuatik renang Sidoarjo, Suyanto, dirinya menyampaikan cabor akuatik Sidoarjo dalam Porprov IX di Malang raya, belum lama ini, berhasil menyumbang sebanyak 53 poin.

"Alhamdulillah, hari ini atlet dan pelatih Cabor akuatik yang giliran menerima uang saku," kata Suyanto, yang pernah mendapat penghargaan dari KONI Sidoarjo pada Porprov VIII 2023 lalu, sebagai pelatih terbaik itu.

Ketua Umum KONI Sidoarjo, Imam Mukri Affandi, saat di lokasi, sempat mengucapkan terima kasih kepada mereka, karena atas perjuangan dari para atlet dan pelatih Cabor olah raga tersebut selama Porprov Jatim

2025, kontingen Sidoarjo mampu berprestasi pada nomor urut ke -3 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

"Semoga pada Porprov X tahun 2027 di Kota Surabaya, para atlet Sidoarjo lebih berprestasi," ujarnya. [kus.wwn]



Pelatih dan atlet cabang olah raga di Sidoarjo, ketika menerima uang saku di kantor sekretariat KONI Sidoarjo.

HARIAN
Bhirawa
Mata Jajap Bhiru Sindoal



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komunitas Rakyat Antikorupsi Sorot SPMB SMP dan SMA Negeri

Dituding Tidak Transparan dan Banyak Dikeluhkan Masyarakat

Sidoarjo, Memorandum

Komunitas Rakyat Antikorupsi Sidoarjo menyoroti karut-marut SPMB (sistem penerimaan murid baru) tingkat SMP dan SMA negeri di Kota Delta. Ormas (organisasi kemasyarakatan) ini prihatin dengan kondisi ini dan mendesak segera dievaluasi. Karena banyaknya keluhan yang muncul dari warga.

Ketua Komunitas Rakyat Antikorupsi Sidoarjo Mohlisson mengatakan, sistem SPMB tahun ini kurang transparan. "Demi rasa keadilan masyarakat, tolong dibenahi dan dievaluasi," ujar Cak Son, sapaan akrabnya kepada *Memorandum*, Sabtu (12/7).

Kekecewaan mendalam, kata Cak Son, dirasakan sebagian besar wali murid setelah anak-anak mereka dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SPMB. Sejumlah LSM di Sidoarjo juga menemukan berbagai kejangalan dalam SPMB tahun ini.

Meski sistem ini diklaim berbasis *online* dan transparan, lanjut Cak Son, nyatanya hasil akhir siapa saja yang diterima di seluruh SMPN dan SMAN di Kabupaten Sidoarjo tidak diumumkan secara terbuka melalui sistem

online. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya pengendalian sistem secara tertutup oleh birokrasi.

Cak Son dan ormasnya yang mencoba menginvestigasi langsung ke SMAN 3 Sidoarjo, salah satu sekolah yang dikeluhkan masyarakat, mengaku tidak mendapat jawaban yang jelas. Bahkan, perwakilan dari humas SMAN 3 justru memberikan penjelasan yang tidak masuk akal. "Walaupun kategori yang diambil adalah domisili, tetap acuan SPMB itu adalah nilai, untuk pemerataan," ujar Cak Son, menirukan jawaban yang terlontar dari perwakilan SMAN 3 itu.

Cak Son pun mempertanyakan keterbukaan publik di Sidoarjo ketika ada pengadaan soal SPMB. "Pihak sekolah justru menyarankan agar kami mengadu ke pusat,"



Ketua Komunitas Rakyat Antikorupsi Sidoarjo Cak Son.

ceritanya.

Ketika Cak Son mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya, ia kembali dihadapkan pada situasi saling lempar tanggung jawab antarpetugas. Dua operator SPMB Jatim yang ditemui hanya menyampaikan kalau mereka hanya pelaksana. SPMB kerja sama dengan pihak vendor yang ditunjuk dinas pendidikan.

Sejumlah wali murid juga mengeluhkan bahwa tidak ada sosialisasi yang komprehensif mengenai sistem SPMB ini sebelum pelaksanaan, sehingga banyak orang tua merasa kebingungan dan dirugikan.

Gejolak serupa tidak hanya terjadi di Sidoarjo, namun juga mulai bermunculan di

Cak Son foto bersama anggotanya usai menggelar rapat.

beberapa daerah lain di Indonesia. Karena itu, Cak Son dan rekan-rekannya mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Jatim dan DPRRI turun tangan dan mengawal keluhan masyarakat soal SPMB.

"Kami butuh kepastian dan keadilan. Kalau memang sistem ini bertujuan baik, maka harus transparansi dan hak masyarakat untuk mengetahui hasilnya adalah keharusan," pungkasnya. (san/epc)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



M. SAIFUL ROHMAN/TADAR SIDOARJO

PELAYANAN MAKSIMAL: Proses perizinan di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) dilakukan dengan cepat dan mudah.

Perkim CKTR Permudah Layanan Perizinan, Upaya Digitalisasi dan Pembenaan Sistem Jadi Solusi

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) terus berkomitmen meningkatkan pelayanan publik, khususnya bidang perizinan. Upaya digitalisasi dan pembenaan sistem terus dilakukan agar proses menjadi lebih cepat, transparan dan akuntabel.

Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo, Mochamad Bachruni Aryawan mengatakan, saat ini ada empat layanan perizinan utama yang menjadi kewenangan pihaknya.

"Dua di bidang tata ruang pertanahan, yaitu PKKPR dan SKRK, serta dua lainnya di bidang tata bangunan, yaitu PBG dan SLF," ucapnya saat ditemui Radar Sidoarjo.

PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Peman-

faatan Ruang merupakan syarat awal kegiatan usaha maupun bangunan. Sementara SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan.

Untuk bidang tata bangunan, izin yang dulu dikenal dengan IMB kini berubah menjadi PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Sedangkan SLF (Surat Laik Fungsi) diperlukan sebelum bangunan digunakan, sebagai jaminan keselamatan dan fungsi teknisnya.

Bachruni menjelaskan, sebagian layanan kini telah berbasis digital dan terhubung langsung dengan sistem pusat. PKKPR misalnya, bisa diakses melalui OSS (Online Single Submission), sehingga masyarakat bisa mengurus dari mana saja.

Namun, untuk SKRK masih dilakukan secara manual ka-

rena ada kendala teknis pada sistem e-Buddy. "Gambar layout itu belum bisa otomatis diunggah dan sesuai skala, ini yang sedang kami cari solusinya agar bisa dikembangkan ke digital," ujarnya.

Proses digitalisasi tetap disertai pendampingan teknis di lapangan. Masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem online tetap bisa mendapatkan bimbingan dari petugas.

"Kalau PBG dan SLF menggunakan SIMBG, aplikasi dari pusat, sistemnya upload dokumen lalu kami cek, kalau ada kekurangan langsung kami beri notifikasi untuk diperbaiki," jelasnya.

Meski terdengar praktis, Bachruni mengingatkan bahwa proses digital pun tetap membutuhkan ketelitian dari pemohon. Banyak yang tidak membaca notifikasi, padahal hal itulah yang menyebabkan keterlambatan.

● Ke Halaman 10





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dinkes Pastikan Belum Ada Kasus Flu Burung pada Manusia

KOTA-Dinkes Sidoarjo memastikan belum ada laporan kasus flu burung yang menyerang manusia. Hal tersebut ditegaskan oleh Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sidoarjo, Danang Abdul Ghani.

"Kalau yang mengenai unggas saya kurang tahu, tapi yang menyerang manusia, sejauh ini tidak ada kasus," ucapnya, Minggu (13/7).

Kendati belum menyerang manusia, Dinkes Sidoarjo mengaku sudah bersiap. Surat edaran dari Kemenkes tentang kewaspadaan dini sudah ditindaklanjuti.

"Kami sudah melakukan sosialisasi kewaspadaan dini kepada para peternak," jelasnya.

Pihaknya akan terus memantau kemungkinan adanya gejala yang mencurigakan di fasilitas layanan kesehatan. Langkah itu menjadi bagian dari deteksi dini yang melibatkan Puskesmas hingga Tim Gerak Cepat (TGC).

Selain itu, edukasi masyarakat soal gejala flu burung dan pencegahannya juga dilakukan secara berkala. Termasuk anjuran memakai masker dan APD bagi petugas yang kontak dengan unggas.

"Flu burung merupakan penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia, di Indonesia, kasus terakhir dilaporkan pada 2017 lalu," terangnya.

Danang berharap, masyarakat tetap waspada namun tidak panik. Jika ada gejala mirip flu burung, warga diminta segera memeriksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat.

"Kami minta masyarakat tidak menyepelekan gejala seperti demam tinggi, batuk, atau sesak napas, apalagi kalau punya riwayat kontak dengan unggas," pungkasnya. (sai/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

PERBAIKAN: Lampu Stadion Jenggolo akan direhabilitasi.

Disporapar Anggarkan Rp 5,6 Miliar untuk Rehabilitasi Lampu Stadion Jenggolo

BUDURAN-Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo mengucurkan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar untuk memperbaiki lampu Stadion Jenggolo.

Rehabilitasi dilakukan guna meningkatkan kualitas sarana olahraga yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus menjadi bagian dari pengembangan sektor pariwisata berbasis olahraga.

Kepala Disporapar Sidoarjo, Yudhi Iriyanto mengatakan, lampu stadion perlu diperbarui agar layak digunakan untuk pertandingan resmi. Teru-

tama untuk gelaran Liga 3 dan Liga 4 yang selama ini menggunakan Stadion Jenggolo sebagai kandang.

"Stadion Jenggolo ini jadi penopang Stadion Gelora Delta yang diprioritaskan untuk Liga 1 dan pertandingan lain yang bertaraf internasional," ucapnya, Minggu, (13/7). "Jadi, fasilitas pendukungnya juga perlu ditingkatkan agar tetap representatif," imbuhnya.

Dia menjelaskan, lampu yang baru nantinya akan disesuaikan dengan regulasi pertandingan malam. Tujuannya agar Stadion Jenggolo memenuhi

syarat teknis secara nasional.

"Ini bagian dari pelayanan kami kepada masyarakat Sidoarjo, terutama pecinta olahraga," ujarnya.

Yudhi memastikan, proses rehabilitasi dirancang secara matang, baik dari aspek teknis maupun estetika. Targetnya, stadion tidak hanya nyaman dipakai tetapi juga menarik secara visual.

"Ke depan, Stadion Jenggolo bukan hanya jadi tempat pertandingan, tapi juga bisa menjadi destinasi baru bagi wisatawan lokal maupun luar daerah," pungkasnya. **(sai/vga)**





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Perkim CKTR Permudah...

"Rata-rata masyarakat belum aware, begitu ada notice kami kembalikan, tapi tidak ditindaklanjuti, akhirnya pengajuan tertunda karena berkas tidak kunjung diperbaiki," terangnya.

Dalam kondisi ideal, layanan seperti SKRK dapat selesai dalam waktu 14 hari. Tapi itu dengan catatan semua dokumen lengkap dan sesuai sejak awal.

"Kalau lengkap, kita bisa selesaikan cepat, tapi banyak yang maksi masuk walaupun masih ada yang kurang, itu yang bikin proses jadi panjang," katanya. Hal serupa juga terjadi dalam peng-

urusan tata bangunan. Pemohon kerap menyerahkan wewenang ke pihak ketiga yang tidak paham isi dokumen.

"Kadang yang dikuasakan nggak tahu apa-apa, ditanya teknis dia bingung, jadi saat ada kekurangan, tidak bisa langsung dijawab, akhirnya balik lagi ke awal," bebarnya.

Ketelitian dalam membuat gambar teknis juga menjadi kunci. Layout, koordinat dan skala harus jelas karena akan memengaruhi output izin.

"Kalau salah gambar, harus bongkar ulang, itu dua kali kerja dan bisa memakan waktu lebih lama," ujarnya. Perkim CKTR juga rutin berkoordinasi

dengan berbagai instansi lain seperti BPN, DLHK, PUPR, Bina Marga dan Dishub. Kolaborasi tersebut penting untuk sinkronisasi data dan memastikan seluruh aspek teknis terpenuhi.

Dalam kasus tertentu, misalnya perbedaan antara gambar dan sertifikat tanah, Perkim akan mengarahkan ke BPN untuk ukur ulang.

"Kalau tidak cocok, kami tidak berani keluarkan izin, harus sinkron-

dulu, karena ini menyangkut legalitas dan lokasi," tegasnya.

Soal waktu pengurusan AMDAL, Bachruni mengakui bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Namun, jika dokumen PBG lengkap, proses tetap bisa berjalan sesuai jalur.

Sejauh ini, ia menyebut keluhan dari masyarakat tidak terlalu banyak. Kalau ada, umumnya berasal dari pemohon yang tidak mengikuti proses

sampai selesai. "Mereka kadang bilang sudah lama masukkan, tapi setelah dicek nggak pernah datang lagi, saat diberi arahan pun kadang tidak bisa menindaklanjuti," katanya.

Ke depan, pihaknya berharap ada pemahaman yang lebih baik dari masyarakat. "Kami ingin masyarakat lebih cermat, lengkapi dulu syarat sebelum mengurus. Itu akan mempercepat semuanya," pungkasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

LAYANAN GRATIS: Suasana Puskesmas Sidoarjo kemarin (13/7). Kepesertaan aktif BPJS di Sidoarjo mencapai 77,14 persen.

Warga Bisa Berobat ke Puskesmas Meski Belum Terdaftar BPJS

SIDOARJO - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo memastikan program prioritas Bupati Sidoarjo yaitu berobat gratis bagi seluruh warga bisa dilaksanakan. Hal tersebut karena Sidoarjo tergolong kabupaten yang sudah Universal Health Coverage (UHC) dengan kepesertaan aktif BPJS mencapai 77,14 persen.

Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo dr Danang Abdul Ghani menjelaskan, saat ini, cakupan kepesertaan aktif BPJS di Sidoarjo telah mencapai 77,14 persen dari 99,5 persen dari total jumlah penduduk yang terdaftar BPJS.

"Artinya sudah ada sekitar 1,6 juta penduduk aktif. Ini modal kuat bagi Sidoarjo untuk menyukseskan layanan

gratis," ujarnya. Menurutnya, dengan persentase tersebut warga bisa langsung berobat ke Puskesmas meski tidak memiliki BPJS atau BPJS nya non-aktif. "Jadi nanti ketika berobat ke puskesmas atau RS, BPJS bisa aktif," katanya.

Kepesertaan BPJS bisa aktif tapi dengan syarat bersedia masuk ke dalam golongan kelas 3 dan mau mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). "Kalau kasusnya darurat, pelayanan medis tetap diutamakan. SKTM bisa menyusul dalam waktu 3x24 jam," katanya.

Sedangkan jika warga tanpa BPJS mau berobat tanpa kondisi khusus, maka diharapkan memiliki SKTM terlebih dulu. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Awasi Pembuang Sampah Liar, DLHK Tambah CCTV di 10 Titik

SIDOARJO - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah liar. Salah satu langkah konkretnya, dengan memperluas cakupan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan lainnya.

Ketua Satgas Ronda Sampah DLHK Sidoarjo Suyanto Asmoro mengatakan, sebenarnya sudah ada lima CCTV yang dipasang pihaknya sejak akhir tahun 2024 kemarin. Lokasinya ada di Desa Ngaban, Lingkar Timur Rangkah Kidul, Lingkar Timur Kebonsari, exit Tol Tanggulangin, dan Jalan KH Ali Mas'ud.

"Kami akan tambah 10 titik lagi tahun ini, fokusnya di lokasi yang minim pengawasan dan banyak pelanggaran," ungkapnya. Penambahan CCTV itu diklaim sangat membantu kinerja tim Satgas Ronda Sampah yang selama ini aktif menyisir titik-titik rawan pembuangan liar, terutama pada malam hingga dini hari.

Suyanto menyebutkan, timnya kerap menemukan pelanggaran di jam-jam sepi. "Dengan kamera, kita bisa tindak tanpa harus selalu *stand by* di lapangan," tambahnya. Tak hanya menindak, DLHK juga aktif mengedukasi masyarakat soal pentingnya membuang sampah pada tempatnya. (eza/uzi)



Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



LEGISLATIF

Tidak Kuorum, Paripurna LKPJ 2024 Gagal Ambil Keputusan

Liputan Sidoarjo.com



Dari laporan sekretaris dewan yang disampaikan ketua DPRD Sidoarjo, jumlah absensi anggota dewan yang masuk sebanyak 29 orang.

Sedangkan sesuai Tatib DPRD Sidoarjo nomor 1 tahun 2024, pasal 101 menyatakan bahwa untuk pengambilan keputusan Raperda di paripurna, harus memenuhi 2/3 dari seluruh jumlah anggota dewan.

Artinya jumlah anggota dewan yang hadir minimal harus 34 orang dari jumlah keseluruhan anggota dewan sebanyak 50 orang.

Meski tidak kuorum, rapat paripurna untuk sesi pembacaan Badan anggaran terhadap pelaksanaan APBD 2024, tetap dibacakan oleh juru bicara Banggar yakni Raymond Tara Wahyudi ST.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto SH.MH, sempat menyampaikan intrupsinya agar rapat paripurna tidak dilanjutkan karena tidak kuorum.

Namun ketua dewan Abdillah Nasih menyatakan untuk pembacaan laporan Banggar tidak harus kuorum.

Sedangkan aturan Kuorum nanti pada pengambilan keputusan Raperda.

Selanjutnya setelah laporan Banggar, sesi rapat paripurna kedua tidak bisa dilanjutkan karena tidak kuorum dan di tunda.

Setelah ditunda hampir satu jam hingga pukul 18.30 malam dan kuorum tetap tidak tercapai, maka paripurna tetap tidak bisa dilanjutkan dan ditunda roga hari kedepan.

Yang cukup mengejutkan, Selain Fraksi Gerindra yang dari awal tidak terlihat di ruang paripurna, anggota Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo juga tidak semua terlihat hadir secara fisik di ruang paripurna, hanya terlihat M.Nizar dan Warih Andono.

Fraksi PAN, Fraksi Nasdem dan Fraksi Demokrat hanya yang fraksi Demokrat yang hadir.

Di dalam ruang paripurna, hanya diisi oleh mayoritas anggota Fraksi PKB, Fraksi PDIP dan ketua fraksi PKS. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Boikot Lagi, Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan LKPj Bupati Sidoarjo Tahun 2024 Tidak Quorum Ditunda



Sidoarjo (republikjatim.com) - Konflik antara Bupati Sidoarjo dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo diduga belum redah. Ini menyusul, adanya aksi boikot lagi saat sidang Paripurna Pembacaan Pandangan Akhir (PA) Fraksi - Fraksi di DPRD Sidoarjo yang dilanjutkan Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 di ruang Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis (10/07/2025) petang.

Dampak aksi boikot ini, menyebabkan sidang paripurna tidak memenuhi quorum. Dari 50 jumlah anggota DPRD Sidoarjo, hanya ada 29 anggota wakil rakyat yang hadir dalam rapat paripurna itu. Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Sidoarjo disebutkan untuk sidang pengambilan keputusan dapat dilaksanakan apabila memenuhi quorum dengan dihadiri 2/3 anggota DPRD atau 34 legislator di DPRD Sidoarjo.

Dengan pertimbangan itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih yang memimpin sidang paripurna didampingi Wakil Ketua I Suyarno dan Wakil Ketua III Warih Andono, akhirnya menyatakan sidang paripurna tidak bisa dilanjutkan dan dinyatakan ditunda.

"Berdasarkan Tatib DPRD Pasal 101 ayat 4 bahwa sidang akan ditunda selambat-lambatnya tiga hari ke depan. Atau akan dijadwal ulang melalui pembahasan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sidoarjo," ujar Abdillah Nasih.

Aksi boikot yang diduga dilakukan sebagian anggota DPRD ini menjadi salah satu aksi lanjutan dari dugaan perseteruan sebelum Bupati dan DPRD Sidoarjo sebelumnya. Hal ini, diduga dipicu statemen Bupati Sidoarjo, Subandi yang dinilai sudah melecehkan marwah lembaga DPRD Sidoarjo. Terutama, soal statemen DPRD menghambur-hamburkan uang. Meski Bupati Sidoarjo sendiri sudah pernah meminta maaf dalam rapat paripurna sebelumnya. Namun, hal itu diduga belum merendahkan konflik dengan sebagian pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo.

Berdasarkan pantauan di lapangan sesuai Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Pendapat Akhir (PA) Fraksi-Fraksi yang dilanjutkan rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ada beberapa fraksi yang konsisten dengan aksi boikot itu. Sebut saja, Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo. Dari 9 anggota, seluruhnya tidak hadir dalam sidang paripurna itu. Hal sama juga dilakukan pada sidang paripurna sebelumnya. Sikap ini semakin menguatkan indikasi Partai Gerindra mencabut dukungan politiknya terhadap kepemimpinan Bupati Sidoarjo.

Meski di sisi lain, Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Mimik Idayana yang menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo tetap mendampingi Bupati Sidoarjo Subandi. Fakta itu, tidak mempengaruhi sikap politik Fraksi Partai Gerindra untuk berseteru dengan Bupati Sidoarjo.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar yang dalam sidang paripurna sebelumnya solid, kali ini tidak semua anggotanya hadir. Sikap politik sama ditunjukkan beberapa anggota Fraksi PKB, PDIP, PAN dan Fraksi Partai Nasdem - Demokrat yang ikut aksi boikot. Dampaknya, pelaksanaan sidang paripurna itu dinyatakan tidak memenuhi kuorum dan akhirnya ditunda.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menilai sidang paripurna kali ini tidak quorum. Dampaknya, sidang paripurna tidak bisa dilanjutkan. Terutama, untuk agenda Pengambilan Keputusan atas LKPJ Bupati Sidoarjo yang sebenarnya menjadi dinamika politik di kalangan legislatif dan eksekutif di Sidoarjo.

"Tentu, setelah ini masalah itu akan kami komunikasikan dengan fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo. Terutama, kepada tiga fraksi yang anggota banyak tidak hadir dalam sidang paripurna kali ini," ungkap politisi senior PKB yang akrab disapa Cak Nasih ini.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Selain itu, Nasih yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo ini menguraikan beberapa fraksi di DPRD Sidoarjo menjadi kepanjangan tangan dari masing-masing partai pengusung anggota DPRD Sidoarjo. Menurut Nasih kemungkinan juga akan dibangun komunikasi dengan masing-masing pimpinan partai yang mendapat kursi di DPRD Sidoarjo.

"Kemungkinan akan kita komunikasikan dengan lintas partai. Sekarang yang terpenting lagi masalah tidak quorum ini jangan sampai menjadi hambatan pembangunan di Sidoarjo yang sudah disetujui RPJMD-nya. Kalau kemudian hanya karena belum ketemu satu persepsi sama terhadap LKPj ini, lalu semua yang sudah disepakati bersama-sama kita putuskan, terabaikan, itu kan eman-eman (muspro)," tegas Nasih.

Dalam sidang paripurna ini, meski sempat mengalami penundaan, Nasih menilai sidang LKPj tidak molor karena ada batasan waktu sampai 7 bulan ke depan. Hanya saja, meski belum berimplikasi terhadap masyarakat, tetapi hal ini bisa mengganggu kinerja DPRD Sidoarjo.

"Apalagi, saat ini sudah memasuki nota pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) maupun agenda kerja lainnya. Artinya, sangat mungkin ke depannya, kinerja kita seperti kerja tayang. Uber-uber (dikejar) pembahasan mulai PAK APBD 2025 maupun agenda pembahasan RAPBD 2026. Karena memang pasca Instruksi Presiden, ada percepatan untuk PAK. Tapi tetap dari sisi waktu tidak ada masalah," tandas politisi asal Kecamatan Waru ini.

Sementara Bupati Sidoarjo, Subandi mengaku tidak ada masalah dengan tidak memenuhi quorumnya sidang LKPj Tahun 2024 hingga keputusannya ditunda itu.

"Ndak papa (tidak masalah). Ini tentunya, tidak mempengaruhi atau mengurangi (penilaian) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Itu saja," katanya.

Selain itu, lanjut Subandi jika dalam sidang lanjutan tetap tidak memenuhi quorum, maka tentunya bisa langsung dengan berkonsultasi ke Gubernur Jatim.

"Dalam konsultasi ke Gubernur Jatim itu nantinya bisa menggunakan dasar Peraturan Kepada Daerah (Perkasa) sebagai rujukannya," pungkasnya. Hel/Waw





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tak Kourum, DPRD Sidoarjo Tunda Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Sidoarjo 2024



Zonajatim.com, Sidoarjo – Rapat paripurna pendapat akhir sekaligus keputusan fraksi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo tahun 2024 yang digelar di DPRD Sidoarjo pada Kamis (10/7/2025) malam dan dihadiri Bupati Subandi ditunda karena peserta rapat tidak memenuhi kuorum.

Anggota dewan yang hadir, baik di ruang sidang paripurna DPRD Sidoarjo sebanyak 29 orang, padahal sesuai tata tertib menyebutkan rapat paripurna bisa digelar jika dihadiri minimal 2/3 dari seluruh anggota dewan yang berjumlah 50 orang atau sebanyak 34 orang.



"Sidang paripurna diskors selama 15 menit sebanyak satu kali, namun peserta rapat paripurna juga tetap tidak kuorum," kata Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih dari Fraksi PKB.

Menurutnya beberapa anggota dewan tidak bisa hadir alasannya belum diketahui, nanti kita lakukan komunikasi lebih intens ke fraksi yang tidak hadir serta lewat lintas partai. Anggota dewan yang tidak hadir yakni 9 orang dari Fraksi Partai Gerindra, 4 orang dari Fraksi PAN, 2 dari Fraksi Nasdem dan beberapa anggota dewan dari Fraksi PDIP, PKS, PKB dan Golkar.



Bupati Sidoarjo Subandi saat beri keterangan didampingi M Nizar Ketua Fraksi Partai Golkar

Bupati Sidoarjo H Subandi mengatakan hari ini rapat paripurna tidak kourum, maka kita menunggu rapat paripurna lagi agar bisa kourum. "Jika rapat paripurna lagi tidak kourum, maka nanti kita konsultasi pada Gubernur Jatim. Kalau memang perlu dikeluarkan Perkada ya kita putuskan," paparnya. Pr

Zonajatim.com

Zonajatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

AKSI 'BOIKOT' BERLANJUT: Paripurna LKPj Bupati Sidoarjo Tidak Kuorum, Ketua DPRD Putuskan Ditunda

"Ketidakkuoruman sidang paripurna LKPj Bupati ini jangan sampai menjadi hambatan pembangunan Sidoarjo yang sudah didok RPJMD-nya," kata Abdillah Nasih, Ketua DPRD Sidoarjo.



Sidang paripurna DPRD Sidoarjo membahas LKPj Bupati Tahun Anggaran 2024, diputuskan ditunda karena tidak kourum atas kehadiran anggota legislatif di sana.

NUSADAILY – SIDOARJO: Tensi politik di Sidoarjo terkait 'perseteruan' Bupati Subandi dengan sebagian anggota DPRD, belum meredah. Para legislator di sana kembali melakukan aksi 'boikot' terhadap sidang paripurna pembacaan Pandangan Akhir (PA) fraksi-fraksi di DPRD, dilanjutkan pengambilan keputusan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, pada Kamis (10/7/2025) sore.

Atas aksi ini menyebabkan sidang paripurna tidak memenuhi kuorum,--dari 50 jumlah anggota legislatif hanya 29 orang yang hadir. Berdasarkan Peraturan DPRD No. 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Sidoarjo disebutkan untuk sidang pengambilan keputusan dapat dilaksanakan apabila memenuhi kuorum dengan dihadiri 2/3 anggota DPRD, atau 34 legislator.

Dari pertimbangan ini Ketua DPRD Abdillah Nasih S.M yang memimpin sidang paripurna akhirnya menyatakan sidang tidak bisa dilanjutkan, atau ditunda. "Sesuai Tatib DPRD Pasal 101 ayat 4 bahwa sidang akan ditunda selambat-lambatnya tiga hari ke depan, atau akan dijadwal ulang melalui pembahasan Badan Musyawarah," ujarnya.



Aksi boikot dilakukan sebagian anggota DPRD ini merupakan kelanjutan dari 'perseteruan' sebelumnya. Pemicunya adalah statemen Bupati Subandi yang dinilai 'melecehkan' marwah lembaga legislatif, karena statemen bahwa DPRD menghambur-hamburkan uang. Meski Bupati Subandi pernah minta maaf, rupanya belum juga meredakan perseteruannya dengan sebagian anggota legislatif di sana.

Bahkan yang cukup menarik adalah sikap konsisten fraksi Gerindra. Dari 9 anggotanya,--semua tidak hadir dalam sidang paripurna tersebut. Hal sama juga dilakukan pada sidang paripurna sebelumnya. Sikap ini tentunya semakin mengindikasikan Partai Gerindra telah mencabut dukungan politik terhadap Bupati Subandi.

Meski satu sisi juga Ketua DPC Gerindra Sidoarjo, Mimik Idayana menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo. Namun itu tetap tidak mempengaruhi sikap politik fraksinya untuk tetap 'berseteru' dengan Bupati Subandi. Sehingga wajar pula bila sempat melahirkan pertanyaan publik; "Mungkinkah ada agenda terselubung dari sikap politik fraksi Gerindra?"

Terlepas itu, fraksi Golkar yang solid dalam sidang sebelumnya,--kali ini juga tidak semuanya hadir. Sikap politik sama ditunjukkan beberapa anggota fraksi PKB, PDIP, PAN dan Nasdem yang ikut melakukan aksi 'boikot' sehingga pelaksanaan sidang paripurna tidak memenuhi kuorum.

Cak Nasih, sapaan Ketua DPRD Sidoarjo mengatakan tidak kuorumnya sidang paripurna sehingga tidak bisa dilakukan pengambilan keputusan atas LKPj bupati ini sebenarnya sebuah dinamika politik saja. "Tentunya masalah ini akan kami komunikasikan dengan fraksi-fraksi di DPRD, terutama kepada tiga fraksi yang anggota banyak tidak hadir," ujarnya.

Dikatakan, fraksi DPRD merupakan kepanjangan partai. Sehingga kemungkinan juga akan dibangun komunikasi dengan masing-masing pimpinan partai. "Istilahnya kita komunikasi lintas partai. Terpenting lagi dengan ketidakkuoruman ini jangan sampai menjadi hambatan pembangunan Sidoarjo yang sudah didok RPJMD-nya," ujarnya. "Jadi aman kalau kemudian hanya karena belum ketemu satu persepsi sama terhadap LKPj ini, lalu semua yang sudah bersama-sama kita putuskan, terbaik," tambahnya.

Ditambahkan, terjadinya ketegangan politik ini sebenarnya bukan karena hubungan Bupati dengan DPRD. "Itu sudah clear dan tidak lagi menjadi ganjalan. Tetapi karena memang kebijakan masing-masing partai kepada fraksinya dalam memandang sudut pandang LPJ 2024 yang masih belum sama," tegasnya kembali.

Meski sempat mengalami penundaan, Cak Nasih, yang juga menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo ini menilai sidang LKPj tidak molor karena ada batasan waktu sampai 7 bulan. Hanya saja, meski belum berimplikasi terhadap masyarakat, namun hal ini bisa mengganggu kinerja DPRD Sidoarjo.

Apalagi saat ini sudah memasuki nota pembahasan PAK maupun agenda kerja lainnya. "Jadi sangat mungkin ke depannya, kinerja kita seperti kerja tayang. Uber-uberan pembahasan mulai PAK APBD 2025, maupun agenda pembahasan RAPBD 2026," ujarnya. "Karena memang pasca Instruksi Presiden, ada percepatan untuk PAK. Tapi tetap dari sisi waktu tidak ada masalah," tambah Cak Nasih.

Sementara itu, Bupati Subandi mengatakan tidak ada masalah dengan tidak kuorumnya sidang LKPj sehingga keputusannya ditunda. "Ndak papa. Ini tentunya tidak mempengaruhi atau mengurangi WTP yang diraih Pemerintah Sidoarjo. Itu aja," ujarnya.

Begitu pula, lanjut Abah Bandiu, bila dalam sidang lanjutan tetap tidak kuorum, tentunya bisa konsultasi dengan Gubernur Jatim. "Dalam konsultasi ke gubernur itu nantinya bisa Perkada (Peraturan Kepada Daerah) sebagai acuannya," ujarnya. (*cak ful)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidak RS Anwar Medika Balongbendo, Bupati Sidoarjo Pastikan Pelayanan Prima dan Umumkan Kabar Gembira: Bisa Layani Pasien BPJS Kembali Per 1 Juli 2025



SIDOARJO/SOROTMATA.COM – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit (RS) Anwar Medika di Kecamatan Balongbendo pada Jumat pagi (11/7/2025). Didampingi oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo dan Camat Balongbendo. Sidak ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan dan kelayakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat di Sidoarjo Barat.

Dalam kunjungannya, Bupati Sidoarjo H. Subandi meninjau langsung berbagai aspek pelayanan di RS Anwar Medika Balongbendo, mulai dari alur pendaftaran pasien hingga ruang perawatan. Ia berdialog dengan manajemen rumah sakit dan beberapa keluarga pasien untuk mendengar langsung masukan dan pengalaman mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh standar pelayanan kesehatan telah dijalankan dengan baik oleh RS Anwar Medika. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan jaminan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga Sidoarjo,” ujar H. Subandi di sela-sela inspeksi.

Selain pelayanan, H.Subandi juga menaruh perhatian khusus pada fasilitas yang tersedia. Menurut pantauannya, kondisi fasilitas di rumah sakit tersebut sudah baik dan terjaga kebersihannya. Ia menilai, dengan fasilitas yang memadai, masyarakat di wilayah Sidoarjo Barat tidak perlu ragu untuk memanfaatkan layanan kesehatan di RS Anwar Medika Balongbendo.

“Fasilitasnya saya lihat sudah baik dan bersih. Ini penting untuk kenyamanan dan proses penyembuhan pasien. Masyarakat Sidoarjo Barat dan sekitarnya bisa menjadikan RS Anwar Medika sebagai rujukan utama,” tuturnya.

Lebih lanjut, H.Subandi menyampaikan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2025, RS Anwar Medika Balongbendo akan kembali dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi warga sekitar, terutama keluarga pasien yang selama ini harus mencari pengobatan jauh dari daerah asalnya.

“Ini yang paling penting untuk diketahui masyarakat. Saya sampaikan kepada keluarga pasien dan seluruh warga, per tanggal 1 Juli 2025, RS Anwar Medika Balongbendo sudah bisa kembali melayani pasien BPJS Kesehatan tanpa harus jauh-jauh ke luar wilayah Sidoarjo,” tegasnya.

H. Subandi secara khusus menginstruksikan Camat Balongbendo beserta seluruh jajaran kepala desa untuk segera menyosialisasikan informasi penting ini kepada warganya.

“Tolong seluruh Pak Kades dan perangkat di Kecamatan Balongbendo dan sekitarnya segera informasikan kepada masyarakat bahwa berobat di RS Anwar Medika sudah bisa lagi menggunakan BPJS. Jangan sampai ada warga yang tidak tahu dan akhirnya berobat jauh padahal di sini sudah bisa,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit ini sempat terhenti sejak 1 Januari 2024. Dengan diaktifkannya kembali kerja sama ini, diharapkan dapat mempermudah akses kesehatan bagi ribuan warga, khususnya di wilayah Sidoarjo Barat. (Nuri)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo 'Boikot' Paripurna LKPJ 2024 Bupati, Pengamat: "Rakyat Tetap yang Jadi Korban!"

Jumat, 11 Juli 2025 | 12:42 WIB



DPRD Sidoarjo boikot sidang LKPJ 2024. Pakar politik: rakyat bisa jadi korban tarik-ulur kepentingan. Apa yang sebenarnya terjadi? Foto: Istimewa

Sidoarjo, Ruang.co.id – Suasana ruang Paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, kesekian kalinya kembali berubah tegang. Pada Kamis 10 Juli 2025, forum penting yang dijadwalkan yang sejatinya untuk menyampaikan Pandangan Akhir (PA) terhadap LKPJ Bupati Subandi Tahun Anggaran 2024, mendadak gagal total karena tidak kuorum terjadi aksi boikot anggota dewan.

Hanya 29 dari 50 anggota DPRD yang hadir. Tensi politik makin terasa panas. Tetapi ironisnya, hanya beberapa hari sebelumnya berselang, RPJMD Bupati Subandi 2025–2029 justru disetujui oleh DPRD dalam sidang paripurna.

Situasi kontras ini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik Sidoarjo. Ada yang berpendapat sesuatu yang dianggapnya lucu, atau semacam banyolan badut – badut politik dari kedua belah pihak.



Hingga muncul pertanyaan, bagaimana mungkin kinerja masa lalu seorang kepala daerah ditolak, namun rencana strategis lima tahun ke depan disetujui? Apakah ini bentuk ketegasan pengawasan atau hanya manuver politik tanpa arah?

Aksi Boikot, Penolakan Politis atau Penegasan?

Ketidakhadiran massal fraksi Gerindra, serta sebagian kecil anggota Golkar, PKB, PDIP, PAN, dan Nasdem, pada PA LKPJ Bupati menjadi sorotan.

Terutama Gerindra, yang seluruh sembilan anggotanya tidak hadir, seperti makin menguatkan sinyalemen 'pencabutan dukungan politik' terhadap Bupati Subandi. Kemungkinan juga sebaliknya sebagai tanda terang sebuah pengkhianatan komitmen politik.

M. Nizar, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo mengklarifikasi atas ketidakhadiran seorang anggotanya di Paripurna LKPJ Bupati Subandi. Dikatakan Nizar, anggotanya dipastikan hadir. Yang bersangkutan sudah hadir meski agak sedikit terlambat.

"Kebetulan kemarin saya yang jadi juru bicara (jubir) fraksi partai kami. satu anggota saya yang tidak hadir dan sudah mengkonfirmasi begini, kemarin itu beliau masih sempatkan untuk hadir paripurna. Semuanya hadir di paripurna, meski flight beliau tiba sedikit terlambat. Sedangkan paripurna berlangsung siang tepat waktu. Rapat paripurna selesai lebih cepat, karena diputuskan untuk ditunda," ungkap Nizar.

Ini alasan Cak Nasik sang ketua pemimpin paripurna memutuskan untuk ditunda, lantaran jumlah anggota parlemen lebih banyak yang tidak hadir dan dinyatakan tidak memenuhi kuorum untuk pengambilan keputusan PA fraksi – fraksi tentang LKPJ Bupati tahun 2024.

"Sesuai Tatib (tata tertib) Pasal 101 ayat 4, karena tidak kuorum, sidang terpaksa ditunda dan akan dijadwalkan ulang maksimal tiga hari," tegas Ketua DPRD Abdillah Nasih, atau akrab disapa Cak Nasik, saat memimpin paripurna PA LKPJ Bupati Subandi, Kamis (10/7/2025).

Namun ia mengingatkan, agar aksi ini jangan sampai berlarut – larut yang dapat menghambat pembangunan, yang telah dituangkan dalam RPJMD disetujui DPRD.

"Jangan sampai karena perbedaan persepsi terhadap LKPJ, kita abaikan apa yang sudah disepakati untuk kemajuan Sidoarjo," tambahnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Ini Bukan Konflik, Tapi Koreksi" dari DPRD?

Menurut Cak Nasik, persoalan ini murni dinamika politik, bukan perseteruan personal. Ia menegaskan bahwa penolakan LKPJ adalah bagian dari hak pengawasan dewan.

"Hubungan kami dengan Bupati baik-baik saja. Tapi fraksi-fraksi tentu punya pertimbangan politik dan administratif masing-masing dalam menilai kinerja 2024," ujarnya lugas.

Ketua DPRD juga mengaku siap menjembatani komunikasi lintas fraksi dan partai, bahkan membuka ruang diskusi dengan pimpinan parpol jika diperlukan.

"Demokrasi yang sehat itu bukan tanpa kritik, justru dari kritik itulah kita bangun perbaikan," katanya.

Bupati Subandi Anggap "Itu Biasa Saja"

Menanggapi sidang LKPJ yang ditunda, Bupati Subandi terlihat memilih merespons dengan tenang.

"Ndak apa-apa. Ini tidak mempengaruhi WTP yang sudah diraih Pemkab Sidoarjo," ujar Subandi usai putusan sidang ditunda.

Ia pun kemungkinan membuka ruang konsultasi ke Gubernur Jawa Timur, jika sidang lanjutan nantinya masih tetap tidak kuorum dewan dalam mengambil keputusan.

"Kalau masih belum kuorum, bisa pakai Perkada (Peraturan Kepala Daerah) sebagai dasar acuannya," tambahnya.

Sikap kalem Subandi menuai pujian, tapi ia juga memunculkan tanda tanya. Apakah ini strategi kompromi sang politikus birokrat, atau sebuah pertahanan dalam menghadapi tekanan politik?

Pengamat Politik: Beda Fungsi, Bukan Kontradiksi Jatuhkan Subandi

Fenomena ini langsung dikaji oleh akademisi dan pengamat politik daerah, Nanang Haromain dari Institute of research and publik development (IRPD). Ia menjelaskan bahwa tidak ada yang aneh dalam sikap DPRD yang menolak LKPJ namun menyetujui RPJMD.

"LKPJ itu evaluasi kinerja masa lalu. Sedangkan RPJMD adalah perencanaan masa depan. Sangat logis jika DPRD tidak puas terhadap kinerja sebelumnya, tapi tetap memberi ruang pada perbaikan melalui RPJMD," jelasnya.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo ini berpendapat, bahwa dinamika ini menunjukkan fungsi kontrol DPRD berjalan sehat.

"Ini bukan pertanda permusuhan, tapi check and balance. Penolakan adalah kritik, persetujuan adalah harapan," ujar Nanang.

Rakyat Bisa Jadi Korban, Jika Kendali Ego Tak Terkelola

Meski secara hukum penolakan LKPJ tak berdampak pada jabatan kepala daerah, namun secara praktis bisa mengganggu kinerja birokrasi dan agenda pembangunan. Terlebih jika perbedaan politik berubah menjadi tarik-ulur yang berkepanjangan.

"Ketika relasi Bupati dan DPRD memburuk, fungsi anggaran dan legislasi bisa terganggu. Yang dirugikan tentu rakyat," tegas pengamat politik berambut pirang ini.

Tapi Ia mengingatkan agar dua lembaga ini tidak terjebak dalam adu emosi, adu ego, apalagi sampai gengsi diri dan kelompok.

Jika pemandangan "seteru" itu juga dapat menjadikan kritik sebagai vitamin demokrasi. "Perbedaan itu sehat, asal tidak mengorbankan pelayanan publik," katanya bijak.

Seteru Paripurna Ajang Adu Kepentingan Kelompok?

Pengamat politik ini berharap dan mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo untuk merenung.

Boikot bukan solusi jika tidak disertai tawaran perbaikan. Penolakan harus disertai penjelasan. Bukan didiam dan laksana mulutnya sengaja dilakban. Persetujuan harus diiringi komitmen pelaksanaan.



Rakyat tidak menuntut drama politik. Mereka hanya ingin jalan mulus, sekolah lancar, air mengalir, dan bantuan tepat sasaran.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jika politik menjadi penghambat, maka kepercayaan publik bisa runtuh lebih cepat daripada kursi kekuasaan.

Dewasa Berdemokrasi, Bukan Lukai Rakyat

Apa yang terjadi di Sidoarjo sejatinya adalah potret demokrasi yang sedang tumbuh. Tapi sang pengamat ini mengatakan, demokrasi tidak boleh tumbuh dengan membiarkan rakyat jadi korban.

Boikot LKPJ, jika benar untuk koreksi, maka arahkan ke perbaikan.
Persetujuan RPJMD, jika benar demi masa depan, maka kawal agar tidak hanya jadi dokumen tanpa aksi.

Kepada Ruang.co.id publik Sidoarjo percaya, bahwa kedewasaan politik ditunjukkan bukan dalam debat panas di ruang paripurna. Namun dalam dinginnya kepala dan hangatny hati, untuk melayani rakyat dengan nurani.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Kabupaten Sidoarjo Gandeng Bappeda Gelar Konsultasi Publik Rancangan Perda RPJMD



Filesatu.co.id, SIDOARJO | PANITIA Khusus (Pansus) | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum konsultasi publik akhir untuk membahas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Acara ini berlangsung di ruang rapat Bappeda Sidoarjo dan dihadiri oleh sejumlah pihak penting, termasuk pimpinan DPRD, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, dan insan pers.

Forum ini merupakan implementasi amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Suyarno, S.H., M.H., menyampaikan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan cerminan aspirasi masyarakat Sidoarjo.

"RPJMD harus mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dari seluruh lapisan," ujar Suyarno, menekankan pentingnya kesinambungan program dan pengelolaan anggaran yang optimal demi kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik. Ia juga menjelaskan bahwa Ketua DPRD, H. Abdillah Nasikh, berhalangan hadir karena jadwal yang bersamaan.





Program Unggulan RPJMD 2025–2029

Pansus RPJMD Sidoarjo memaparkan 14 program unggulan yang akan menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan:

Disampaikan oleh Ketua Pansus RPJMD, H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H.:

- Penciptaan 1.000.000 lapangan kerja baru.
- **Berobat gratis** untuk warga Sidoarjo.
- **Makan bergizi gratis** bagi lansia.
- Penyediaan 20.000 beasiswa kuliah, SD, dan SMP untuk anak yatim.
- Pemberian 2.000 paket pupuk & benih gratis bagi petani dan nelayan.
- Alokasi Rp50 juta modal usaha untuk UMKM.
- Penyaluran Rp500 juta per desa/kelurahan untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan insentif perangkat desa.

Disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus RPJMD, H. Moch. Dhamroni Chudlori, M.Si.:

- Peningkatan 20.000 UMKM.
- Pembangunan tiga dinas baru (penataan kota, PDAM, transportasi) serta bus sekolah gratis.
- Kenaikan tunjangan 100% untuk tenaga kesehatan, guru ngaji, GTT (Guru Tidak Tetap), dan honorer.
- Pembangunan pusat kreativitas pemuda dan desa wisata, dengan konsep satu desa satu duta wisata.
- Renovasi 2.000 warung rakyat.
- Kemudahan perizinan usaha melalui konsep Smart City.
- Revitalisasi taman kota dan perumahan.

Inti pembahasan dalam forum ini tetap mengarah pada tiga aspek utama: **keberlanjutan pembangunan, pemerataan hasil pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

Kepala Bappeda Sidoarjo, Dr. Heri Soesanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa semua masukan dari masyarakat, LSM, hingga akademisi akan ditampung untuk proses finalisasi dokumen. "RPJMD ini adalah fondasi lima tahun ke depan. Maka dari itu, penyusunannya harus menyeluruh, terbuka, dan menjawab tantangan nyata masyarakat Sidoarjo," tegasnya. ***





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sinergi Forkopimda Sidoarjo: DPRD Kawal Program Ketahanan Pangan Lewat Pesantren



Ketua DPRD Sidoarjo dengan Kopolwota Sidoarjo

[Filesatu.co.id](https://filesatu.co.id), SIDOARJO | **KETUA** DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdilllah Nasih, menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan menghadiri kegiatan penanaman jagung di lahan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) milik Pondok Pesantren Al Amanah Junwangi, Krian, pada Rabu (9/7/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional "Penanaman Jagung Serentak Kwartal III dan Penanaman Jagung di Lahan Perhutanan Sosial" yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Polresta Sidoarjo turut melaksanakannya secara daring dari lokasi Ponpes Al Amanah Junwangi.

Abdilllah Nasih hadir bersama jajaran Forkopimda Sidoarjo, termasuk Bupati Sidoarjo H. Subandi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, serta pengasuh Ponpes KH. Nur Kholis Misbah. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi kuat antara legislatif, eksekutif, TNI-Polri, dan tokoh agama dalam mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo.

Dalam sambutannya, Abdilllah Nasih menyampaikan **dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Sidoarjo** terhadap upaya kolaboratif ini. Ia menyoroti peran strategis pesantren dalam mengedukasi masyarakat sekaligus mewujudkan ketahanan pangan dari basis komunitas.

"Kami di DPRD sangat mengapresiasi peran pondok pesantren dalam mendukung ketahanan pangan. Ini bukti nyata bahwa **kolaborasi antar-lembaga**, termasuk elemen keagamaan, bisa memperkuat program strategis nasional," ujar Abdilllah.

Program penanaman jagung yang dikombinasikan dengan budidaya ikan nila di lahan seluas 4.800 meter persegi ini dinilai sebagai langkah inovatif yang berkelanjutan dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar.

Abdilllah Nasih berharap kegiatan serupa dapat diperluas ke pesantren-pesantren lain di Sidoarjo. Ia juga memastikan bahwa DPRD akan **mengawal kebijakan** yang mendukung ketersediaan pupuk, bibit, serta infrastruktur pendukung lainnya demi keberhasilan swasembada pangan di tingkat daerah.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Evaluasi Prestasi Komisi D DPRD Sidoarjo Undang Cabor Sidoarjo



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Evaluasi prestasi komisi D DPRD Sidoarjo undang Cabor Sidoarjo. Digelarnya pekan olahraga provinsi Jawa Timur (Porprov) yang dilaksanakan di Malang Raya, semua cabang olahraga yang di naungi oleh KONI Sidoarjo ikut andil dalam kompetisi tersebut. Olahraga salah satu yang menjadi kebanggaan pemerintah setempat diharapkan bisa meraih juara dua setelah Surabaya. Namun alhasil prestasi olahraga tersebut tidak bisa mencapai target yang diharapkan.

Tidak tinggal diam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo juga memantau cabang olahraga (Cabor) yang telah ikut andil dalam pertandingan di Porprov tersebut. Dengan dana yang tidak sedikit di peruntukan untuk event pada olahraga yang telah terlaksana. Pemerintah Sidoarjo baik eksekutif maupun legislatif berharap atlit Sidoarjo bisa memboyong medali sesuai yang diharapkan.

Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo telah menggelar hearing, pada Kamis (10/7/2025) diruang rapat Komisi. Yang di hadiri oleh Ketua komisi D, H. Moch Dhamroni Chudlori, Wakil H. Bangun Winarso, Sekretaris Zahlul Yussar dan anggota H. Tarkit Erdianto, H. Sutadji, H. Pujiono, Wahyu Lumaksono, Irda Bella dan Kadisporapar Sidoarjo Yudhi Iriyanto dan semua Ketua atau pengurus Cabang Olahraga.

Evaluasi prestasi komisi D DPRD Sidoarjo undang Cabor Sidoarjo. Rapat yang di pimpin oleh ketua Komisi D, H. Moch Dhamroni Chudlori, rapat dibuka dan dimulai dengan memberikan kesempatan pada para peserta rapat untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah nya.



Banyak yang disampaikan oleh Cabor- cabor bahwa pelaksanaan yang di alami dalam mengikuti Porprov Jatim ini tidak sesuai harapan. Merasa kecewa dengan tidak ada perhatian dari KONI, merujuk pada mosi tidak percaya kepada ketua KONI Sidoarjo (Imam Mukri).

Yusuf Santriono dari Pengkab Percasi (Catur) Sidoarjo ketika ditemui oleh Arjunanusantara news.com menyampaikan bahwa telah mendapatkan undangan dari Disporapar Sidoarjo. Yang intinya evaluasi tentang pekan olahraga Propinsi Jawa Timur yang ada di Malang Raya. Kebetulan teman- teman banyak mengeluhkan tentang persiapan KONI kabupaten Sidoarjo yang menurut penilaian dari kami semuanya ini masih kurang. Dan yang kedua ada ketidak harmonisan antara Cabor dengan KONI sehingga target yang ditentukan oleh Bupati untuk mempertahankan juara dua tidak tercapai.

Bahkan cenderung kepada penurunan prestasi, hal inilah yang membuat DPRD Kabupaten Sidoarjo memanggil kami semuanya untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Namun yang sangat jelas bahwa tidak serta merta terjadi karena ini ada kaitannya juga dengan waktu pemilihan pengurus KONI yang hanya tiga bulan menjelang Porprov di ganti. Hal inilah yang mengakibatkan dari pada KONI Kabupaten Sidoarjo yang tidak bisa mempertahankan juara kedua setelah Surabaya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sebetulnya kami pengkab- pengkab dari awal ke pinginnya pemilihan ketua KONI itu dilakukan secara fer tidak ada titipan dari siapapun, tidak ada faktor politisasi kami menginginkan yang betul-betul fer sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga bahwa musyawarah olahraga Kabupaten (Musorkab) hak sepenuhnya dari pada pengurus Cabor.

Sehingga apa yang dihasilkan nanti itu betul – betul dilakukan secara demokratis, tidak melalui yang sudah terkondisikan, dengan pemilihan kemarin itu kan sudah jelas bahwa hal itu sangat dikondisikan. Sebetulnya didalam kepengurusan KONI Kabupaten Sidoarjo ini apa bila kita ini mau fer, banyak bibit – bibit calon yang kita munculkan. Salah satunya adalah Dr. Mustain Baladan yang sangat berpengalaman. Ada juga Dr. Imam Jawait, kemudian pak Joko yang berpengalaman di bidangnya banyak sebetulnya, sayang sekali hal itu tidak bisa muncul karena saya sendiri kurang tau, apa yang menjadi kendala, sehingga tidak di munculkan pada waktu Musorkab 2025 – 2029. Ini yang perlu harusnya di evaluasi secara menyeluruh biar tidak serta merta menjadi ketua KONI tetapi menurut kami mengadakan Musorkablub yang betul – betul demokratis siapa saja bisa dicalonkan untuk menjadi ketua KONI Kabupaten Sidoarjo.



Sampai Saat ini kami belum pernah di undang oleh KONI Kabupaten untuk rapat-rapat tidak pernah, kesulitan- kesulitan kami juga tidak pernah di akomodir dan banyak hal yang menurut teman – teman Cabor “kami ini merasa tidak punya Bapak”. Sepertinya teman- teman Cabor membuat Mosi tidak percaya kepada KONI Kabupaten Sidoarjo seperti yang di sampaikan oleh Gus Dam tentunya yang perlu diberi” Leadership yang kurang Sip.” Itu istilah beliau, lho ya, ungkap Yusuf Santriono.



Evaluasi prestasi komisi D DPRD Sidoarjo undang Cabor Sidoarjo. Kemudian Bangun Winarso sebagai wakil komisi D, memberikan apresiasi kepada Cabor – cabor dan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas atas pengorbanannya, tentunya yang akan kami lakukan segera menindak lanjuti kesimpulan yang telah disampaikan pada hari ini, semua keluhan dan harapan Cabor sudah kami catat dari komisi D. Kami sudah mem warning KONI dan pengurus KONI dalam persiapan Porprov, tolong tehnis non teknis tetap dipertahankan dan dilakukan. Tentunya ini menjadi pelajaran berharga dan peran penting untuk dua tahun kedepan, kami sangat butuh masukan – masukan semua cabang olahraga, termasuk seperti masukan tadi sudah sekian tahun ngomong ke KONI tapi belum terealisasi.

Kami di komisi D, termasuk rekan – rekan di komisi D banyak yang ada di banggar, tentunya kami akan berkolaborasi dengan Dispora ingin nyicil melengkapi sarkas yang belum ada. Termasuk Dispora menyampaikan ada space – space yang ada di GOR akan digunakan sebagai sekretariat cabang-cabang (Cabor) dan kita dorong untuk dilengkapi.

kesimpulannya, kami akan mengundang Disporapar Sidoarjo dan KONI apa yang menjadi keluhan-keluhan termasuk kwitansi – kwitansi yang belum terselesaikan Mudah-mudahan segera terselesaikan. bagaimana caranya uang itu harus segera diunasi untuk Cabor yang tekor – tekor tadi, ibarat keringat sudah kering belum terbayarkan, pungkasnya.

Begitu juga yang disampaikan oleh H. Dhamroni dan ditegaskan bahwa akan mengundang KONI segera, bahwasanya para Cabor- cabor ini merasa tidak punya bapak. Artinya dalam pergerakan Porprov, perhatian KONI itu sangat minim, maka menjadi evaluasi kita . Sampai kemudian harus nalangi dan nomboki dulu, disampaikan bahwa dana yang ada di KONI ada 16,5 milyar segera kami tekankan untuk segera melunasi, semoga Porprov di tahun berikutnya akan lebih baik.

Maka yang jelas KONI akan kami undang dan kita panggil untuk evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan target yang tidak tercapai. Dan tunggu tanggal mainnya, sifatnya segera, sambil tertawa ramah disampaikan didepan awak media, tegas Dhamroni.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidak Pasien TB di Tulangan, Bupati Sidoarjo Bantu Pengobatan Sekaligus Bedah Rumah Penderita Lewat Program RTLH



Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi bergerak cepat menanggapi laporan warganya yang sakit. Subandi langsung melakukan kunjungan ke salah satu warga Desa Gelang, Kecamatan Tulangan yakni Chaela seorang perempuan berusia 19 tahun yang tengah berjuang melawan tiga penyakit sekaligus peritonitis TB (infeksi perut), meningitis TB (infeksi selaput otak) dan TB paru, Jumat (11/07/2025).

Dalam kunjungan itu, Subandi bersama Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dinas Sosial Sidoarjo, Camat Tulangan, pihak Puskesmas Kepadangan hingga perangkat desa langsung melihat kondisi Chaela yang sudah terdeteksi sakit sejak Juni 2025 hingga saat itu. Penderita dengan kondisi yang sudah membaik dari sebelumnya. Hal ini, tidak lepas dari visit rutin yang dilakukan tenaga kesehatan terdekat.

Subandi meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pihak puskesmas setempat untuk melakukan pemantauan dan penanganan kesehatan secara intensif terhadap kondisi Chaela.



"Saya minta Dinas Kesehatan terus memantau kondisi dan kesehatan mbak Chaela ini. Karena insyaallah dengan pengobatan rutin, TB dapat sembuh," ujar Subandi.



Rumah tinggal Chaela dan keluarganya ternyata tidak layak huni. Bahkan, membutuhkan perbaikan mendesak. Melihat kondisi itu, Subandi segera memutuskan agar rumah Chaela dibedah melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Kami siapkan anggaran sekitar Rp 20 hingga 25 juta untuk perbaikan rumahnya. Harapannya, Mbak Chaela dan keluarganya bisa tinggal di rumah yang lebih layak, bersih dan mendukung proses penyembuhan," ungkap mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.

Sementara Kepala Plt Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo, dr Lakhsmi Herawati yang turut mendampingi kunjungan itu menyampaikan pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kasus Chaela. Apalagi, Chaela merupakan pasien dengan kondisi komorbid yang cukup kompleks.

"Kami sudah melakukan pendampingan melalui tenaga medis Puskesmas Kepadangan, Kecamatan Tulangan. Termasuk, pemberian pengobatan TBC dan rujukan ke rumah sakit. Saat ini, kami fokus pada pemulihan secara bertahap dan penguatan nutrisi," paparnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Laksmi menambahkan edukasi dan dukungan psikososial kepada keluarga sangat penting dalam kasus seperti ini.

"Kami tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pendampingan agar keluarga bisa memberikan perawatan terbaik selama penderita di rumah," tandasnya. Ary/Waw





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Gagal Pertahankan Posisi Runner Up di Ajang Porprov Jatim 2025, Leadership Ketua KONI Sidoarjo Dipertanyakan



Foto sesaat dilantik menjadi ketua KONI Sidoarjo terpilih, Imam Muchri Affandi (hem putih no 2 dari kiri)

Sidoarjo, petisi.co – Nama Ketua Komite Olahraga Indonesia (KONI) Sidoarjo, Imam Muchri Affandi paling banyak disebut sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kegagalan mempertahankan posisi Runner up di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IX tahun 2025.

Hal itu terungkap, saat 49 ketua dan perwakilan pengurus Cabang Olahraga (Cabor) Sidoarjo menghadiri hearing atas undangan legislatif di gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (10/7/2025). Dalam penyampaian Pendapat di hadapan Komisi D, DPRD Sidoarjo mayoritas ketua Cabor mengeluhkan leadership ketua KONI Sidoarjo.



Komisi D DPRD Sidoarjo menampung keluhan dan masukan dari ketua/pengurus cabor dalam hearing

“Selama Porprov berlangsung di Malang, saya tidak pernah melihat Ketua KONI Imam Muchri datang untuk mendukung para atlet. Padahal, kehadiran pimpinan bisa menjadi bentuk dukungan moral yang sangat berarti bagi para atlet yang sedang berjuang,” kata Awan Indrawan, Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sidoarjo.

Awan menyebut Cabor karate Sidoarjo, kerap menjadi juara umum, namun kurang mendapat perhatian dari Ketua KONI. Harapannya jika bisa membangun komunikasi dengan ketua KONI, maka upaya pembinaan prestasi karateka terus meningkat, namun upaya yang dilakukan selalu gagal.

"Saya sampai curhat ke Pak Doso (Doso Wardoyo, Ketua Umum Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia/Porserosi Sidoarjo) dan teman-teman cabor lain. Terkait kesulitan komunikasi dengan Pak Imam Muchri, termasuk tata kelola nyaris kami tidak dapatkan. Bagi saya ini pertamakali mengikuti kejuaraan tapi gak tau pimpinan saya mana," tandas Awan.

Karena itu, ia mencoba mengkritisi sikap acuh ketua KONI Sidoarjo yang cenderung sulit diajak berkomunikasi. Padahal permintaannya sederhana, minimal Imam Muchri bersedia mendengarkan keluh kesah pengurus cabor.

"Ketua KONI sulit dihubungi. Yang kami minta sebetulnya, minimal mendengar keluhan kami. Lha kalau mendengar saja tidak mau, bagaimana bisa mengurus. Kesimpulannya ada istilah *The right man on the right place*. Kalau tidak paham olahraga Yo takono koncomu (silahkan tanya temanmu) atau belajarlal. Jujur, ini kami semua mengalami kesulitan berkomunikasi," keluh Awan.

Keluhan senada juga disampaikan Purwanto, Ketua Pengkab Muaythai Sidoarjo, Ika Adinda dari Cabor Gulat, dan Nita Herliyanti Ketua Cabor Wushu yang bergantian menyampaikan pendapat.

"Untuk sekelas konsumsi saja, para atlet baru dapat dana di hari keempat Porprov. Itupun anggarannya turun tidak sesuai pengajuan, kondisi seperti ini, perhatian KONI kurang dan cenderung tidak peduli terhadap dinamika yang terjadi lapangan. Padahal di lapangan itu dibutuhkan lobi-lobi untuk mempertahankan kemenangan. Ini tidak ada sama sekali suportnya dari KONI," tegas Nita.

Sementara dari Yusuf Satriono, Ketua Pengkab Cabor Percasi menyalahkan proses pemilihan Ketua KONI Sidoarjo yang sarat politisasi. Sehingga ketua yang terpilih hubungannya menjadi tidak harmonis dengan cabor.

"Hubungan yang tidak harmonis ini membuat komunikasi antara KONI dengan cabor gagal terbangun. Sebetulnya sudah sejak awal, semua Pengkab Cabor menginginkan pemilihan ketua KONI Sidoarjo secara fair sesuai AD ART dan tidak ada terkondisikan atau titipan dari siapapun," beber Yusuf.

Ia berpendapat seandainya panitia Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) pemilihan Ketua KONI dilaksanakan secara demokratis, ada banyak kandidat yang kompeten mengisi posisi jabatan tersebut.

"Sebut saja ada nama Mustain Baladan, Ketua Umum Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sidoarjo, kemudian Imam Jawahir cabor panahan, dan Pak Djoko Supriadi, Ketua Harian PBVSI Sidoarjo. Banyak sekali sebetulnya yang paham dan berpengalaman di bidang olahraga," tegasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Yusuf dan kawan-kawan cabor lainnya, tidak banyak berharap jika dari hasil evaluasi yang dilakukan Komisi D DPRD Sidoarjo kemudian berujung munculnya rekomendasi pergantian ketua KONI.

"Mungkin mekanisme yang tepat ada di Musorkab Luar Biasa. Sehingga tidak serta merta tanpa dasar menggantikan Ketua KONI. Kebuntuan komunikasi Pengkab Cabor dengan ketua KONI yang sekarang membuat teman-teman sepakat membuat mosi tidak percaya. Seperti yang disampaikan dalam forum sempat mencuat istilah leadershipnya yang kurang sip," tutupnya.

Seperti diberitakan banyak media sebelumnya, usai dilantik pada 3 Mei 2025, ketua KONI Sidoarjo terpilih Imam Muchri Affandi dalam pidato sambutannya sempat menargetkan prestasi di ajang Porprov Jatim IX di Malang Raya minimal mempertahankan posisi Runner Up.

"Kami siap bekerja keras, memberi ruang yang luas bagi para atlet di semua cabor agar berkembang dan meraih prestasi. Target kami jelas yakni mempertahankan posisi runner-up, atau bahkan menjadi juara umum," kata Imam kala itu. *(luk)*





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Temuan Fakta! SPMB Sidoarjo Dugaan Kuat Sarat Korupsi, Inspektorat atau KPK Wajib Turun Tangan

Minggu, 13 Juli 2025 | 20:22 WIB



KPK turun tangan mengusut dugaan korupsi sistematis dalam SPMB SMPN 2025 Sidoarjo. Manipulasi kuota, gratifikasi, hingga jual kursi terkuak. Foto: Istimewa

Ruang.co.id, Sidoarjo — Sore itu, suasana SMPN di beberapa titik di Kabupaten Sidoarjo tampak lengang. Namun, ada cerita panas yang tengah membakar dunia pendidikan, dugaan korupsi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri tahun 2025.

Meski proses pendaftaran telah usai, aroma manipulasi kuota dan praktik curang mulai menguap ke permukaan. Indikasinya bukan main.

Dari dugaan pemalsuan dokumen domisili, pengalihan kuota jalur afirmasi ke domisili, hingga transaksi gelap kursi sekolah.

Semuanya mengarah pada satu benang merah: korupsi sistematis di balik proses penerimaan siswa baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium potensi permainan tak sehat semacam itu. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada pers mengungkapkan, "Penyuapan/pemerasan/gratifikasi pada penerimaan peserta didik baru atau SPMB menjadi perhatian serius kami. Kurangnya transparansi membuka celah pelanggaran hukum".



KPK bahkan mengidentifikasi modus-modus curang yang kerap terjadi, termasuk pemalsuan Kartu Keluarga (KK), KTP hingga piagam prestasi palsu.

Pihak sekolah pun dinilai tidak menjalankan proses verifikasi secara ketat, sehingga banyak calon siswa lolos tanpa dasar sah.

Fakta lainnya pun mencengangkan. Ada pengakuan dari seorang mantan kepala SMPN di Sidoarjo yang baru pensiun.

Ia menyebut sistem seleksi jalur 'domisili khusus' sebagai jalur rahasia. "Hanya orang-orang tertentu yang tahu bagaimana mekanisme bermainnya," ungkapnya.

Lebih miris lagi, hampir setiap siswa baru yang lolos SPMB, kebanyakan diminta menyiapkan dana Rp2 juta hingga Rp2,2 juta, untuk seragam dan atribut sekolah. Padahal, tidak semua orang tua mampu, terutama di tengah tekanan kesulitan ekonomi global ini.

Tak hanya itu, penggunaan anggaran daerah sebesar Rp300 juta untuk jasa ahli dalam pelaksanaan SPMB pun jadi sorotan. Belum jelas bentuk jasanya, apakah aplikasi, sistem daring, atau sekadar pelatihan biasa. Sayangnya, hingga kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo memilih bungkam.

Aktivis pergerakan mahasiswa 98, Badrus Zaman, menegaskan pentingnya tindakan tegas dari pimpinan daerah.

"Pastikan dulu bahwa bupatinya clear and clean dulu terkait urusan ini, sebelum mengintervensi dinas pendidikan!. Dan pastikan SPMB sesuai Surat Keputusan Bupati tentang petunjuk teknis SPMB 2025" ujarnya lantang.

Ia mendesak kepala daerah untuk tidak tinggal diam, sebab pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. "Bupati boleh turun tangan jika untuk memastikan sistem yang adil, akuntabel, dan bebas korupsi," tambahnya.

Posko Pengaduan Korban Layanan SPMB dan Biro Hukum DPC PWDPI (Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia) Sidoarjo dan LSM Gempur Sidoarjo.

Rencananya Senin ini akan melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo selaku penanggungjawab SPMB SDN/ SMPN ke Inspektorat Kab. Sidoarjo dan KPK.

"Ini tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi dan turun temurun kecurangan SPMB di Sidoarjo!. Kami tugaskan tim Biro Hukum PWDPI untuk lapor ke Inspektorat dan KPK," tandas Agus 'Ucok' Subakti, Ketua DPC PWDPI Sidoarjo.

Kasus ini, baginya, bukan sekadar soal bangku sekolah, tetapi masa depan generasi muda. Saatnya pemerintah daerah tak sekadar jadi penonton, namun bergerak cepat dan bersih membenahi sistem yang sakit.

